

## DPRD Kotabaru Paripurna Pengesahan Tiga Raperda



Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotabaru, H Mukhnim, menandatangani dokumen raperda, Senin (30/11/2020).

Sumber : <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/01/dprd-kotabaru-paripurna-pengesahan-tiga-raperda>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, kembali menggelar paripurna. Paripurna persidangan ke-1 rapat ke-10 tahun 2020/2021 berlangsung di Gedung DPRD. Rapat dipimpin Wakil Ketua I, H Mukhni AF, dan Wakil Ketua II, Muhammad Arif SH, MHum, membahas tiga buah rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disahkan secara bersama.

Tiga buah Raperda, diuraikan dalam persidangan yang disampaikan masing-masing perwakilan panitia khusus (Pansus).

Mukhni mengatakan, tiga raperda disahkan berdasarkan hasil keputusan rapat paripurna DPRD Kotabaru Nomor 14 tahun 2020, dan Nomor 15 tahun 2020 tanggal 22 Juni tahun 2020, tentang pembentukan dan struktur panitia khusus DPRD Kabupaten Kotabaru.

(Sumber : <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/01/dprd-kotabaru-paripurna-pengesahan-tiga-raperda>.)

DPRD Kabupaten Kotabaru beberapa waktu lalu melaksanakan rapat paripurna masa persidangan ke 1 rapat ke 10 di gedung DPRD Kotabaru. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Mukhni dan Muhammad Arif yang dihadiri secara langsung oleh Pjs Bupati Kotabaru, Muhammad Syarifuddin. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan.

Dalam kesempatannya, dikatakan oleh Mukhni bahwa, berdasarkan hasil keputusan rapat Paripurna DPRD Kotabaru Nomor 14 tahun 2020 dan nomor 15 tahun 2020 tanggal 22 Juni tahun 2020, tentang pembentukan dan struktur panitia khusus (Pansus) DPRD Kotabaru.

Kemudian, lanjutnya lagi, Pansus 2 diberi kepercayaan untuk membahas dua buah Raperda yaitu, Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2018, tentang retribusi jasa usaha, dan Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kotabaru nomor 4 tahun 2018, tentang pajak daerah.

Mukhni juga mengatakan bahwa untuk Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2018 retribusi jasa usaha sudah di paripurnakan pada tanggal 26 Oktober 2020 lalu, dan untuk Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kotabaru nomor 4 tahun 2018 tentang pajak daerah baru selesai dibahas oleh Pansus 2 DPRD Kotabaru bersama pihak eksekutif dan siap untuk diparipurnakan.

(Sumber dari <https://kalselpos.com/2020/12/06/bupati-ajukan-3-raperda-dalam-paripurna/>)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/01/dprd-kotabaru-paripurna-pengesahan-tiga-raperda>, 08 Desember 2020, 08.00 WITA.
2. <https://kalselpos.com/2020/12/06/bupati-ajukan-3-raperda-dalam-paripurna/>, 08 Desember 2020, 08.00 WITA.

#### **Catatan:**

**Peraturan Daerah adalah** Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadur dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.